

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan inflasi di Kabupaten Banyuwangi pada Triwulan III Tahun 2020 adalah sebagai berikut: a. Pada bulan Juli 2021 Kabupaten Banyuwangi mengalami inflasi Month to Month (MtM) sebesar 0,23% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 104,87. Laju Inflasi Tahun Kalender (YtD) sebesar 0,80%, sedangkan laju inflasi Year on Year (YoY) sebesar 1,32%. Komoditas yang memberikan sumbangan terbesar terhadap terjadinya inflasi adalah komoditas: 1.Bawang Merah; 2.Cabai Rawit; 3.Tomat; 4.Buah Naga; 5.Ikan Tongkol/Ikan Ambu-Ambu. b. Pada bulan Agustus 2021 Kabupaten Banyuwangi mengalami deflasi Month to Month (MtM) sebesar -0,08% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 104,79. Laju Inflasi Tahun Kalender (YtD) sebesar 0,72%, sedangkan laju inflasi Year on Year (YoY) sebesar 1,26%. Komoditas yang memberikan sumbangan terbesar terhadap terjadinya inflasi adalah komoditas: 1.Tomat; 2.Daging Ayam Ras; 3.Sekolah Menengah Atas; 4.Ikan Lamuru; 5.Beras. c. Pada bulan September 2021 Kabupaten Banyuwangi mengalami deflasi Month to Month (MtM) sebesar -0,16% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 104,62. Laju Inflasi Tahun Kalender (YtD) sebesar 0,56%, sedangkan laju inflasi Year on Year (YoY) sebesar 1,27%. Komoditas yang memberikan sumbangan terbesar terhadap terjadinya inflasi adalah komoditas: 1.Daging Ayam Ras; 2.Rokok Kretek Filter; 3.Mobil; 4.Laptop/Notebook; 5.Kulkas/Lemari Es.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Banyuwangi pada Triwulan III Tahun 2021 adalah sebagai berikut: a. Pada Juli 2021, komoditas bawang merah memberikan andil inflasi tertinggi sebesar 0,11 persen. Beberapa komoditas bahan makanan lainnya juga memberikan andil terhadap terjadinya inflasi, yaitu cabai rawit sebesar 0,09 persen; tomat sebesar 0,06; buah naga sebesar 0,06 persen; dan ikan tongkol sebesar 0,05 persen. Sementara itu, inflasi di Bulan Juli tertahan dengan menurunnya harga daging ayam ras yang memberikan andil deflasi sebesar 0,14 persen. Selain itu, komoditas beras juga menjadi penyumbang deflasi dengan andil sebesar 0,04 persen. Komoditas emas perhiasan juga memberikan andil deflasi sebesar 0,02 persen. Hal ini dikarenakan turunnya harga emas dunia. b. Komoditas cabai rawit pada Agustus 2021 memberikan andil deflasi tertinggi sebesar 0,15 persen. Beberapa komoditas bahan makanan lainnya juga memberikan andil terhadap terjadinya deflasi, yaitu bawang merah sebesar 0,08 persen; tongkol diawetkan sebesar 0,05 persen; terong sebesar 0,03 persen; dan telur ayam ras sebesar 0,02 persen. Selain itu deflasi juga dipicu oleh menurunnya harga emas perhiasan yang memberikan andil sebesar 0,08 persen. Sementara itu, beberapa komoditas berpotensi mengerem deflasi di Bulan Agustus dengan naiknya harga tomat yang memberikan andil sebesar 0,07 persen. Selain itu, komoditas daging ayam ras juga mengerem deflasi dengan memberikan andil sebesar 0,03 persen. Selain itu juga terjadi kenaikan tarif sekolah untuk sekolah menengah atas dengan andil sebesar 0,03 persen. Komoditas lain yang memberikan andil inflasi yaitu ikan lamuru sebesar 0,03 persen dan beras sebesar 0,02 persen. c. Pada September 2021 komoditas cabai rawit memberikan andil deflasi tertinggi sebesar 0,15 persen. Beberapa komoditas bahan makanan lainnya juga memberikan andil terhadap terjadinya deflasi, yaitu bawang merah sebesar 0,08 persen; tongkol diawetkan sebesar 0,05 persen; terong sebesar 0,03 persen; dan telur ayam ras sebesar 0,02 persen. Selain itu deflasi juga dipicu oleh menurunnya harga emas perhiasan yang memberikan andil sebesar 0,08 persen. d. Sementara itu, beberapa komoditas berpotensi mengerem deflasi di Bulan Agustus 2021 dengan naiknya harga tomat yang memberikan andil sebesar 0,07 persen. Selain itu, komoditas daging ayam ras juga mengerem

deflasi dengan memberikan andil sebesar 0,03 persen. Selain itu juga terjadi kenaikan tarif sekolah untuk sekolah menengah atas dengan andil sebesar 0,03 persen. Komoditas lain yang memberikan andil inflasi yaitu ikan lamuru sebesar 0,03 persen dan beras sebesar 0,02 persen.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Banyuwangi pada Triwulan III Tahun 2021 adalah sebagai berikut: a. Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa - Bali mulai diterapkan di Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 3 Juli 2021. Pengetatan di berbagai sektor dilaksanakan untuk kebaikan kita semua. Pelabuhan Ketapang yang merupakan pintu masuk ke Pulau Jawa dari Bali harus diawasi dengan ketat. Penumpang dari kendaraan umum maupun pribadi yang melintas, diperiksa kelengkapan persyaratan kartu bebas Covid-19 berupa hasil rapid tes antigen dan kartu vaksin. Pemkab Banyuwangi bersama jajaran Forkopimda akan terus melakukan sosialisasi dan kontrol ketat terhadap pelaksanaan PPKM Darurat di Banyuwangi. Pengetatan PPKM Darurat ini belum tersosialisasikan dengan baik. Perlu kerja keras lagi untuk mensosialisasikan dan mengontrolnya. Semua warga Banyuwangi juga diminta untuk mematuhi PPKM Darurat. Ini berlaku sampai tanggal 20 Juli saja. Mohon kerjasama semuanya untuk mematuhi semua imbauan dari PPKM Darurat ini sebagai upaya menekan penyebaran kasus Covid-19 di Banyuwangi. Selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat aktivitas warung, rumah makan, restoran, dan usaha kuliner lainnya tidak diperbolehkan melayani makan di tempat (dine-in), melainkan hanya melayani pesan antar (delivery order) atau dibungkus (take away). PPKM Darurat ini berdampak sangat luar biasa bagi para pelaku usaha kuliner, hotel, hiburan, tour and travel serta pelaku seni budaya. Namun ini semua merupakan ikhtiar semua elemen bangsa untuk bersama melawan pandemi. Pengawasan selama PPKM Darurat terus ditingkatkan, dan bila perlu akan ada punishment bagi mereka yang melanggar. Semua aturan-aturan PPKM Darurat yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) tentang PPKM Darurat Covid-19 di Kabupaten Banyuwangi. SE tersebut berisi kebijakan pengendalian kegiatan kantor pemerintahan, pusat ekonomi, hingga aktivitas masyarakat secara umum. b. Selama ini Banyuwangi memang dikenal sebagai penyuplai kebutuhan cabai rawit di sejumlah daerah, khususnya di wilayah Jabodetabek. Hanya saja, pada awal tahun 2021 produksi cabai rawit mengalami penurunan signifikan lantaran intensitas hujan tinggi sejak akhir tahun 2020. Dari areal tanaman sekitar 3.000 hektare, hanya 128 hektare yang bisa dipanen. Itu pun produksinya menurun. Biasanya dalam satu hektare bisa 9 hingga 10 ton. Saat ini hanya bisa dipanen 1 sampai 1,5 ton per hektare. Menurunnya produksi cabai disebabkan serangan penyakit yang biasa datang saat musim penghujan. Harga cabai pun meroket tinggi di atas angka Rp 100 ribu per kilogram. Rata-rata tanaman (ditanam) pada bulan Agustus dan September 2020, mulai belajar berbuah usia 3 sampai 4 bulan. Kalau kondisi normal bisa 20 kali petik. Bisa bertahan 8 sampai 10 bulan. Ketika intensitas hujan tinggi, risiko serangan hama penyakit juga semakin tinggi. Seperti penyakit cacar dan sebagainya. Kalau sudah seperti ini hukum ekonomi berlaku. Ketika permintaan banyak, sementara ketersediaan barang terbatas, terjadi lonjakan harga. Harga cabai bisa berada pada kisaran Rp 110 ribu lebih per kilogramnya. c. Antusiasme anak muda Banyuwangi untuk menggeluti bisnis pertanian dengan segala subsektornya ternyata masih cukup tinggi. Ini terlihat dari banyaknya anak muda yang mendaftar dalam "Jagoan Tani" Banyuwangi, sebuah ajang yang dilaksanakan oleh Pemkab Banyuwangi untuk menciptakan generasi baru usaha pertanian. Tidak sampai satu bulan sejak pendaftaran dibuka, terdapat ratusan tim mendaftar. Hingga pendaftaran ditutup, 30 Juni 2021 total terdapat 443 tim mendaftar dengan total 1.528

anak muda yang terlibat. Dari 443 proposal tersebut, 175 tentang rintisan usaha pertanian dan 268 ide usaha pertanian dengan segala subsektornya, mulai tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, perikanan, hingga peternakan. Semangat mengembangkan agribisnis dari anak-anak muda Banyuwangi sangat luar biasa. Semoga ajang ini bisa terus mendorong lahirnya generasi baru pelaku usaha agribisnis yang bisa memberi nilai tambah ke ekonomi lokal.

Program "Jagoan Tani" untuk mengajak anak-anak muda Banyuwangi menggeluti bisnis pertanian dengan segala subsektornya. d. Untuk mendukung para pelaku usaha dan pedagang pasar yang sangat terdampak saat pandemi, pada tanggal cantik 7.7 lalu 8.8 dan 9.9 yang jatuh pada tanggal 7 Juli 2021, 8 Agustus 2021 dan 9 September 2021, Pemkab Banyuwangi kembali menggelar Hari Belanja ke Pasar Rakyat dan UMKM yang rutin digelar setiap "tanggal cantik" setiap bulannya. Hari Belanja ke Pasar dan UMKM ini adalah gerakan gotong royong di Banyuwangi untuk membantu pemulihan ekonomi. Diikuti ribuan ASN, BUMN, BUMD, swasta, dan berbagai komunitas. Seiring dengan pemberlakuan PPKM Darurat, pada tanggal ini seluruh elemen berbelanja sembako di pasar dan warung terdekat. Seluruh sembako yang terkumpul akan diserahkan ke Posko Satgas Covid-19 di kecamatan masing-masing. Nantinya didistribusikan untuk membantu warga yang terdampak pandemi covid-19, khususnya saat PPKM Darurat sekarang ini. Program ini sangat disambut baik oleh para pedagang dan pelaku usaha. Hari Belanja ke Pasar dan UMKM telah dilaksanakan sejak 4 April 2021. Setiap yang ikut gerakan belanja ini diwajibkan mengunggah nota dan foto pembelian melalui formulir online yang telah disiapkan pemerintah daerah. Paket sembako hasil belanja cantik didonasikan kepada ribuan pegawai toko yang harus tutup selama PPKM Darurat 3-20 Juli 2021 di sejumlah kecamatan, para tukang becak, ojek online dan para PKL, yang jam operasionalnya harus dibatasi maksimal pukul 20.00 WIB. Meskipun kebijakan ini sulit namun harus diambil untuk mengendalikan aktivitas agar bisa menekan penularan Covid-19 untuk melindungi masyarakat semua. Kegiatan ini berlanjut dalam belanja tanggal cantik bulan-bulan berikutnya karena dampak pandemi masih sangat dirasakan oleh banyak pihak sehingga perlu atensi dari semua pihak. e. Pemkab Banyuwangi memberikan dana bantuan uang tunai kepada ribuan warung kecil/PKL yang jam operasionalnya harus dibatasi pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat 3-20 Juli. Nilai bantuan yang diberikan sebesar Rp300.000 per warung kecil/PKL. Nilai tersebut mungkin tidak bisa menutupi potensi hilangnya omzet para pelaku usaha ultra mikro tersebut, namun diharapkan bantuan uang ditambah paket sembako tersebut bisa sedikit membantu. Dengan program ini mereka Insya Allah berkomitmen taat aturan, sehingga kita bisa mengurangi mobilitas hingga puluhan ribu orang. Kalau mobilitas dikurangi, Insya Allah penyebaran Covid-19 bisa ditekan. Semua rumah sakit sudah hampir penuh, tenaga kesehatan kewalahan, maka perlu dukungan semua pihak agar membatasi aktivitas dan selalu taat protokol kesehatan dengan baik dan benar. f. Pemkab Banyuwangi kembali menggalang gerakan untuk membantu warung kecil/pedagang keliling/PKL yang jam operasionalnya harus dibatasi pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat 3-20 Juli. Selain memberikan bantuan uang tunai, para PNS di kabupaten tersebut bergerak memborong dagangan warung kecil/pedagang keliling/PKL. Di masa sulit ini semua harus saling dukung. Para ASN yang tetap mendapat gaji bulanan dari negara digerakkan untuk membantu pelaku usaha kecil informal. Semua PNS di Banyuwangi dilibatkan. Satu orang misalnya membeli Rp50.000-100.000, tentu bisa hasilkan transaksi yang bisa membantu teman-teman pelaku usaha kecil dan informal. PNS di Banyuwangi kompak membantu para pelaku usaha kecil informal, sehingga dagangan mereka laku dan bisa semakin menaati aturan jam operasional selama PPKM Darurat ini. Gerakan ini dilaksanakan sampai PPKM Darurat selesai dengan sasaran warung kecil/pedagang keliling/PKL serta kafe dan restoran di Banyuwangi, dan seluruh pelaku usaha yang terdampak atas diberlakukannya PPKM Darurat. g. Pemkab

Banyuwangi mengintensifkan vaksinasi Covid-19 kepada para pelaku usaha ultra mikro, termasuk PKL, pedagang keliling, dan warung-warung kecil. PKL hingga warung-warung kecil memiliki tingkat interaksi sosial yang sangat tinggi dalam pekerjaannya. Mereka bertemu dengan banyak orang setiap hari. Vaksinasi ini adalah bentuk komitmen perlindungan ekonomi arus bawah di Banyuwangi. Secara bertahap, Puskesmas mengkoordinasikan pelaksanaan vaksinasi untuk PKL, warung kecil, dan pedagang keliling di masing-masing wilayah. Vaksinasi untuk para pelaku ekonomi terus diintensifkan sembari paralel juga menjalankan vaksinasi untuk anak dan warga lain secara umum. Data sementara, per 23 Juli, sebanyak 422.110 warga Banyuwangi telah divaksin dosis pertama, dan terus berlanjut termasuk untuk dosis kedua. Angka itu setara 31,5 persen dari sasaran atau fokus awal 1,34 juta warga. h. Pemkab Banyuwangi terus melakukan konsolidasi dengan berbagai stakeholder dalam penanganan pandemi Covid-19 sekaligus pemulihan ekonomi yang sangat terpuruk akibat pandemi ini. Salah satunya dengan menggandeng kampus-kampus di Banyuwangi. Pembahasan secara virtual dilaksanakan oleh Bupati Banyuwangi bersama para pimpinan perguruan tinggi di Banyuwangi, yaitu Direktur PSDKAU Universitas Airlangga Banyuwangi, Politeknik Negeri Banyuwangi, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, IAI Ibrahimy Genteng, IAI Darussalam, STIKES Banyuwangi, Universitas PGRI Banyuwangi, STIKOM PGRI Banyuwangi, Universitas Bakti Indonesia Banyuwangi, STAI Blambangan, Politeknik Mas Ami Internasional Banyuwangi, Akademi Kesehatan Rustida Glenmore, dan Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Banyuwangi. Untuk mengatasi pandemi Covid-19 ini, harus ada keterlibatan semua pihak termasuk juga pihak kampus agar turut mengambil peran, baik dalam bidang-bidang medis maupun non-medis. i. Usaha mikro di Banyuwangi kembali menerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Pada 2021, sebanyak 54.213 lebih pelaku usaha mikro mendapatkan bantuan yang bernilai Rp 1,2 juta per orang tersebut. Adapun tahun lalu, sebanyak 70.177 usaha mikro di Banyuwangi telah menerima program yang digagas Presiden Joko Widodo tersebut. Pada 2020, nominal bantuan adalah Rp2,4 juta per usaha mikro. Sehingga sejak 2020, total hampir 125.000 usaha mikro di Banyuwangi, tepatnya 124.390, menerima BPUM. Tahun ini ada sekitar 54.000 usaha mikro. Program ini terasa dampaknya di masyarakat dan sangat membantu di masa pandemi ini. Para penerima diharapkan bisa memanfaatkan bantuan tersebut untuk penguatan modal usaha dan jangan dipakai untuk konsumtif. Di tahun 2021 ini Pemkab Banyuwangi terus mendorong para pelaku usaha untuk mendapatkan bantuan ini. Program ini diperpanjang pendaftarannya hingga 12 Agustus mendatang. Berdasarkan data dari Kemenkop, pada tahun ini ada 54.213 usaha mikro Banyuwangi yang mendapatkan bantuan ini, pencairannya secara bertahap. j. Untuk mendorong pemulihan ekonomi, Pemkab Banyuwangi mengajak asosiasi dunia usaha berkolaborasi. Sinergi pemulihan ekonomi akan digerakkan agar ekonomi lokal bisa terus bergeliat di masa pandemi. Mereka adalah para ketua dan perwakilan pengurus asosiasi dunia usaha di Banyuwangi, mulai dari Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Real Estate Indonesia (REI) Banyuwangi, Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Indonesia (Gapeknas) Banyuwangi dan sejumlah pelaku usaha lainnya. Pertemuan ini rutin dilaksanakan secara berkala dengan asosiasi dunia usaha, untuk membahas apa-apa yang bisa dikerjakan bersama agar ekonomi bisa bergerak kembali. Asosiasi dunia usaha sebagai mitra strategis dalam pemulihan ekonomi Banyuwangi berperan aktif membantu Pemkab Banyuwangi dalam mengatasi permasalahan dan dampak dari pandemi. k. Kabupaten Banyuwangi berhasil mempertahankan predikat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Award 2021 sebagai kabupaten/kota terbaik se-Jawa dan Bali. Dengan demikian dua tahun berturut-turut Banyuwangi meraih TPID Terbaik, setelah pada 2020 berhasil meraih prestasi serupa. Pengukuhan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional TPID 2021 yang digelar

secara virtual, Rabu, 25 Agustus 2021. Dalam forum yang dihadiri dan dibuka Presiden Joko Widodo, dan diikuti segenap Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur, Bupati/Walikota se Indonesia itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mendapat kesempatan berdialog dengan Presiden. Bupati Ipuk menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah mendukung Banyuwangi sebagai sentra cabai nasional melalui pendampingan, bibit, hingga alat pertanian. Dukungan itu membuat Banyuwangi menjadi salah satu penyangga kebutuhan cabai nasional untuk meningkatkan keberlanjutan pasokan demi stabilitas harga. Produksi beras Banyuwangi terus surplus, berkisar 325.000 ton per tahun. Oleh karena itu Banyuwangi siap jika diberikan penugasan, tidak terbatas hanya pada cabai, tapi juga beras, baik untuk nasional maupun ekspor. Presiden Jokowi menyatakan daerah yang surplus beras seperti Kabupaten Banyuwangi bisa memperkuat ekspor. Jokowi mengatakan surplus beras bisa memperkuat ekspor, karena permintaan ekspor beras baik organik maupun non organik sangat besar. Produk-produk pangan di daerah yang bisa menjangkau pasar ekspor, akan memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Presiden juga menyatakan daerah-daerah yang memiliki surplus produk pangan bisa memanfaatkan platform e-commerce untuk memperluas pasar. Platform-platform digital seperti tanihub, sayurboks, sayurku, dan lainnya bisa mempercepat dan menjangkau pasar lebih luas. Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jember menyatakan bahwa Banyuwangi berhasil mempertahankan predikat sebagai TPID Terbaik karena banyak program pengendalian inflasi yang inovatif. Seperti digitalisasi di sektor pertanian. Selain itu peningkatan SDM pertanian dengan berbagai program seperti Jagoan Tani yang mendorong anak-anak muda berinovasi di sektor pertanian. Sinergitas dan komitmen para pemangku kebijakan di Banyuwangi juga sangat besar. Ada komitmen kuat dari stakeholder seperti bupati, kepala Bulog, kepala perbankan, selalu intens dalam proses-proses high level meeting. Stakeholder di Banyuwangi mampu bahu-membahu dalam pengendalian inflasi. 1. Program "Warung Naik Kelas" (Wenak) terus digulirkan di Banyuwangi. Program ini memfasilitasi warung-warung rakyat untuk "naik kelas", dengan peralatan yang lebih memadai, melalui dukungan dari pemerintah daerah. Warung rakyat ini adalah salah satu tumpuan banyak masyarakat. Pemilik warungnya mendapatkan nafkah, warga masyarakat memperoleh makanan dengan harga terjangkau. Pemkab membantu agar tetap bergeliat di masa sulit ini, sekaligus sebagai bagian dari pemulihan ekonomi. Ini merupakan bagian dari program UMKM Naik Kelas yang kita canangkan. Ada banyak pendekatannya, ada bantuan warung, fasilitasi perizinan, PIRT, bantuan alat produksi, kemasan, pemasaran, dan sebagainya. Program ini akan diteruskan, dan nanti ditambah alokasinya sesuai kemampuan APBD. Bantuan "Warung Naik Kelas" ini merupakan program yang dilaksanakan sejak pertama kali Bupati Ipuk dilantik pada 26 Februari 2021. Secara bertahap menyasar warung-warung kecil yang tergolong ultra mikro. m. Selama ini Pemkab Banyuwangi telah melakukan berbagai upaya pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pedesaan yang dilakukan keroyokan lintas OPD untuk mendorong terus upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang salah satunya berhubungan dengan kemampuan daya beli masyarakat. Alhamdulillah dua desa di Banyuwangi masuk dalam lima rangking tertinggi Indeks Desa Membangun (IDM) Mandiri Nasional. Ini menjadi bukti keseriusan seluruh komponen kecamatan dan desa dalam mewujudkan pembangunan yang maksimal di masing-masing wilayah. Dua desa tersebut adalah Desa Genteng Kulon dan Genteng Wetan yang semuanya berada di wilayah Kecamatan Genteng. Desa mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakatnya, dengan ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi (lingkungan) secara berkelanjutan. Berdasarkan data IDM Tahun 2021, sebanyak 89 desa di Banyuwangi dinyatakan sebagai desa mandiri. Dua diantaranya, Desa Genteng Kulon menduduki peringkat kedua nasional dengan skor 0,9924; sementara Desa Genteng Wetan di

posisi kelima dengan skor 0,9867. Selain status desa mandiri, data IDM 2021 juga menyebut Banyuwangi telah bebas (zero) desa tertinggal. Status desa maju dan berkembang pun tercatat mengalami tren yang positif. Jika dirinci, jumlah desa mandiri saat ini sebanyak 89 desa, desa maju sebanyak 87 desa, dan desa berkembang 13 desa. n. Ratusan anak muda yang tergabung dalam program “Jagoan Tani” Banyuwangi mulai mengikuti fase mentoring. Mereka berasal dari 100 tim yang diseleksi dari 427 tim yang terdaftar di program yang menghadirkan hadiah ratusan juta hingga penyediaan lahan untuk usaha bagi para kandidat terpilih tersebut. Salah seorang mentor yang dihadirkan adalah Ipang Wahid, pelaku ekonomi kreatif tersohor nasional yang kini menggeluti agribisnis. Ipang mengatakan, sektor pertanian dan berbagai subsektornya mulai perikanan, perkebunan, kehutanan, dan peternakan memiliki prospek yang sangat cerah. Saat pandemi, ketika semua sektor tumbuh minus, pertanian tetap tumbuh positif. Program Jagoan Tani yang dikembangkan Pemkab Banyuwangi merupakan upaya melahirkan generasi baru di dunia pertanian yang diberi sentuhan digital. o. Selain Jagoan Tani, Pemkab Banyuwangi juga meluncurkan program “Jagoan Bisnis” untuk mencetak ratusan anak muda setempat menjadi pengusaha muda. Para kandidat terpilih akan mendapatkan mentoring dari para praktisi dan akademisi, serta mendapat hibah modal ratusan juta rupiah. Jagoan Bisnis, mulai mentoring sebagai rangkaian inkubasi hingga nanti melalui berbagai sesi workshop. Para mentor Jagoan Bisnis antara lain adalah Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Hestu Wibowo, owner Jiwa Jawa yang juga banker papan atas nasional Sigit Pramono, Direktur Bank Jatim Ferdian Satyagraha, Komisaris Angkasa Pura Ipang Wahid, Direktur SMESCO Wientor Rahmada, Regional Head Public Policy & Government Gojek Boy Arno Muhamad, dan dosen FEB Universitas Brawijaya Dias Satria. Jagoan Bisnis adalah kegiatan yang terintegrasi. Bukan hanya ide atau rintisan bisnis yang dikompetisikan, tapi juga ada mentoring dan sesi networking untuk membangun jejaring antar anak muda. Ada pula sesi hackspint yang mengajarkan peserta tentang pembuatan prototipe produk bisnis yang ingin dikembangkan. Peserta juga dikoneksikan dengan perbankan hingga diurus perizinan usahanya. Semua itu diberikan agar ide usaha mereka bisa betul-betul berkembang menjadi bisnis riil yang bisa meningkatkan kesejahteraannya. Jagoan Bisnis adalah salah satu wujud optimisme daerah untuk memulihkan ekonomi di tengah kondisi sulit akibat pandemi Covid-19. Bertambahnya pengusaha, diharapkan bisa mendorong tumbuhnya perekonomian di Banyuwangi. p. Penyerapan APBD Banyuwangi termasuk yang tertinggi di Jawa Timur. Per 15 Juli 2021, berdasarkan data Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Keuangan, belanja APBD Banyuwangi terserap hampir 44 persen, tepatnya 43,96 persen. Serapan itu termasuk yang tertinggi di Jatim. Percepatan penyerapan APBD ini adalah untuk menjaga pergerakan ekonomi lokal. Di tengah dunia usaha yang melambat karena pandemi, APBD menjadi instrumen yang bisa berperan menggerakkan ekonomi. Penyerapan APBD cukup penting untuk menggerakkan perekonomian daerah. Gelontoran dana APBD melalui beragam pekerjaan dan belanja daerah bisa menjadi stimulan ekonomi warga. Salah satu kunci bantalan ekonomi saat ini memang ada pada belanja pemerintah, mengingat hampir semua dunia usaha terdampak pandemi. Oleh karena itu pemda harus optimal dalam penyerapan anggaran, sesuai arahan Presiden Jokowi dan Gubernur Jawa Timur. Salah satu yang juga akan dipacu dalam APBD Banyuwagi adalah serapan belanja untuk kebutuhan sosial bagi masyarakat alias bansos. Demikian pula belanja tidak terduga (BTT) untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi. Situasi saat ini memang tidak mudah. Pemkab Banyuwangi terus berupaya mengoptimalkan instrumen fiskal yang juga sebenarnya dalam ruang yang terbatas untuk menggerakkan perekonomian. q. Lahir satu lagi inovasi di Banyuwangi terkait produk hortikultura buah naga. Program Puting Sinaga (Penggunaan Lampu Tingkatkan Produksi Buah Naga), merupakan inovasi dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuwangi. Inovasi Puting Si Naga adalah teknologi tepat

guna penggunaan lampu di kebun buah naga pada malam hari, untuk merangsang pembungaan. Berkat inovasi ini, buah naga para petani dapat menghasilkan banyak buah, sehingga petani dapat melakukan panen buah naga di luar musim atau off season. Saat ini total luasan lahan buah naga Banyuwangi sebanyak 3132 hektar. Dari luasan tersebut, terdapat 2608 hektar yang menggunakan lampu. Inovasi ini sebagai ikhtiar Pemkab bersama masyarakat Banyuwangi untuk meningkatkan produksi buah naga. Inovasi ini diharapkan bisa menginspirasi petani buah naga lainnya sehingga produksinya meningkat dan mampu meningkatkan perekonomian keluarga. Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur UP3 Banyuwangi mensupport penuh penyediaan listrik untuk penerangan kebun buah naga ini. Dulu tanpa inovasi ini, buah naga hanya bisa dipanen semusim saja. Itupun harga di pasaran tidak bersahabat. Per kilogram hanya Rp 2 - 3 ribu saja. Sekarang dengan adanya inovasi ini perekonomian meningkat. Permintaan buah naga dari luar Banyuwangi luar biasa meningkat. Bahkan adanya pandemi tidak berdampak terhadap proses produksi dan permintaan pasar. Pengiriman buah tetap berjalan lancar.

r. Banyuwangi menarik atensi investor pengembang sapi perah dari Australia, Brandon Collins, yang akan membuka sentra sapi perah di Kabupaten Banyuwangi. Banyuwangi yang memiliki kawasan lereng gunung, menurut Collins, cocok untuk dijadikan lokasi peternakan sapi perah. Pasokan pangan cukup dan tinggal menyesuaikan saja teknik perawatan yang diperlukan dengan kondisi di sini. Collins menargetkan peternakan tersebut akan mulai dikerjakan pada Oktober mendatang. Secara gradual nanti akan ada 400 hingga 1200 ekor sapi yang akan dikelola dan terus ditingkatkan. Tak sekadar areal peternakan, dia juga akan mengintegrasikannya dengan kawasan agrowisata dan edukasi. Sehingga dapat semakin memperluas nilai tambahnya bagi Banyuwangi.

s. Program "Jagoan Tani", ajang menumbuhkan semangat kewirausahaan bidang agribisnis untuk anak muda di Banyuwangi, akhirnya telah menyaring tim juara. Sebanyak 1.489 anak muda dari 427 tim mengikuti ajang ini, yang terbagi dalam kategori ide bisnis dan rintisan usaha, dengan total hadiah modal Rp150 juta. Berbagai usaha rintisan dan ide bisnis diajukan dan didiskusikan, mulai pertanian pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, hingga kehutanan. Untuk kategori rintisan usaha, juara pertama adalah sekelompok anak muda Desa Jambewangi di kaki Gunung Raung, dengan nama "Lemonto". Mereka memproduksi berbagai olahan buah lemon, seperti sari lemon, essential oil, lemon kering, sabun, serta hand sanitizer. Semuanya berasal dari buah yang dikembangkan petani lemon Banyuwangi. Mereka pun mendapatkan stimulus modal Rp50 juta yang diserahkan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Pendopo Sabha Swagatha. Pemkab Banyuwangi sangat bersyukur program "Jagoan Tani" mendapatkan animo tinggi dari anak muda. Anak muda Banyuwangi harus tetap bersemangat dan berkreativitas meski pandemi ini memang menghadirkan situasi yang sulit. Jagoan Tani menjadi salah satu pintu untuk mengajak anak-anak muda masuk ke agribisnis, membantu petani, memberi nilai tambah, memberdayakan berbagai potensi lokal. Para juara lainnya untuk kategori rintisan usaha adalah "Pay Farm" yang mengintegrasikan smart garden dan aqua scape, "Agropreneur System" (pakan ternak berkonsep zero waste), "Bumi Sakti" (pengembangan melon di lahan pesisir dengan teknologi irigasi tetes), "Generasi Organik" (pemanfaatan cacing tanah untuk pengembangan pupuk organik), dan "Dadong Awok Farm" yang beternak domba. Adapun untuk kategori ide bisnis (business plan), juaranya adalah tim "Caraka Muda" dengan buku sayur hidroponik, "Azyanti Solid" (mi berbasis singkong), "Jamer Team" (pemasaran olahan jahe merah), "Date Liner" (platform lelang berbagai komoditas), "Banyuwangi Cerdas Griwangi" (platform yang menghubungkan petani dan konsumen), dan "Obugame" (produksi berbagai olahan buah naga).

t. Pengembangan pertanian organik di Banyuwangi terus dilakukan. Setelah beras organik mendapat pasar di luar negeri, kini komoditas kopi Bumi Blambangan sukses meraih sertifikasi organik. Kelompok tani (Poktan) Kopi Rejo dari Desa Gombengsari, Kecamatan

Kalipuro, yang berada di kaki Gunung Ijen, yang telah mendapatkan sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) sebagai produsen kopi organik. Poktan Kopi Rejo menerima dua sertifikat organik, yakni sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) dari lembaga sertifikasi Icort Bogor; dan sertifikat Ekspor Uni Eropa yang diterbitkan ACT (Organic Agriculture Certification Thailand), lembaga sertifikasi organik yang berbasis di Thailand. Menurut dua lembaga sertifikasi tersebut, Poktan Kopi Rejo secara legal dan konsisten telah memenuhi persyaratan dalam memproduksi kopi organik. Ini pencapaian yang membanggakan bagi Banyuwangi yang tengah semangat mengembangkan budidaya kopi organik. Lembaga Icort menyatakan, kopi yang diproduksi Kopi Rejo dengan merek "Kopi Lego" itu dinyatakan bebas pestisida dan pupuk kimia berdasarkan pedoman SNI 6729:2016, Permentan No.64/2013, dan Perka BPOM I/2017. Adapun lembaga ACT Thailand menyebut, Kopi Lego telah memenuhi standar pasar Uni Eropa (UE) karena telah sesuai dengan ketentuan standar organik Amerika Serikat dan Canada. Artinya produk Kopi Lego sudah layak ekspor ke pasar Uni Eropa. Ini membuktikan, kopi rakyat Banyuwangi tidak kalah dengan produk kopi milik perkebunan. Lahan kopi yang dikembangkan Kopi Rejo seluas 32,5 hektar. Adapun produk yang disertifikasi adalah kopi Robusta dan Ekselsa dalam bentuk biji kopi (green bean), biji yang sudah di-roasting, dan bubuk kopi. Budidaya kopi dengan sistem organik sangat menguntungkan petani. Saat masih non organik, produksinya 700-800 kuintal per hektar. Sekarang menjadi 1,3 ton per hektar. Harga kopi organik di pasaran pun lebih tinggi. Kopi organik Rp40 ribu per kg. Sedangkan kopi biasa sekitar Rp30 ribu per kg. Tentu ini meningkatkan kesejahteraan petani. u. Pemkab Banyuwangi kembali menggelar Festival Pangan Non Beras (Fepanora). Beragam makanan dan kudapan dengan bahan dasar berasal dari tanaman pangan non beras, hasil budidaya warga disajikan secara menarik. Festival ini digelar dengan tema Penganekaragaman Pangan untuk Kesejahteraan Masyarakat (PPKM). Beragam makanan unik non beras pun ikut meramaikan festival tersebut. Mulai kwetiau porang, puding cake ubi ungu, rendang jantung pisang, sushi gaplek sidat, buntel ikan nila, puding labu, hingga pasta singkong. Festival ini merupakan bagian dari program peningkatan ketahanan pangan. Masyarakat kita edukasi agar mengolah lebih banyak ragam jenis karbohidrat, non - beras. Ternyata di festival ini, banyak bahan pangan lain yang diolah dan menjadi enak di lidah. Festival ini juga bentuk dukungan Pemkab Banyuwangi terhadap program diversifikasi pangan yang dilakukan Kementerian Pertanian sejak 2020 lalu. v. Banyuwangi telah dikenal menjadi salah satu sentra penghasil buah naga. Banyak desa di Banyuwangi merupakan penghasil buah naga, salah satunya di Desa Bulurejo, Kecamatan Purwoharjo. Kini, bekerja sama dengan salah satu BUMN Pupuk Indonesia, desa itu ditetapkan sebagai Kampung Naga Phonska Plus. Kampung Naga Phonska Plus terletak di Desa Bulurejo, Kecamatan Purwoharjo. Luas lahan buah naga di kampung ini mencapai 700 hektare dengan jumlah petani ratusan orang. Disebut Kampung Naga lantaran hampir semua petani di desa ini kini menanam buah naga. Mereka juga telah menerapkan teknik penyinaran menggunakan lampu di malam hari atau dikenal inovasi Puting Si Naga (Penggunaan Lampu Tingkatkan Produksi Buah Naga). Dengan inovasi penggunaan lampu untuk penyinarannya, buah naga petani Banyuwangi mampu berproduksi sepanjang tahun di luar musim atau off season. Saat di luar musim, harganya relatif tinggi dibanding ketika panen raya. Melihat tingginya produksi buah naga, maka kita harus melakukan hilirisasinya. Petani kita dorong agar tidak hanya menjual komoditasnya, melainkan juga produk hilirnya. Misalnya, diolah jadi mie, dodol, buah kering, keripik, minuman, atau produk olahan lainnya, sehingga petani bisa mendapatkan nilai tambah untuk peningkatan kesejahteraan mereka. Pemkab Banyuwangi juga memiliki program fasilitasi ijin (PIRT). Ini bisa dimanfaatkan dalam pelaksanaan hilirisasi nanti. Jika sudah membuat produk olahan, dinas terkait akan membantu pengurusan ijin dan pemasarannya. w. Pemkab Banyuwangi memiliki sejumlah strategi pemulihan ekonomi seiring dengan mulai

melandainya kasus Covid-19, khususnya di sektor pariwisata. Setelah pandemi terkendali, semua orang sedang searching akan berwisata kemana. Daerah harus menyiapkan diri. Ini akan menjadi momen bagi pariwisata daerah untuk bangkit. Pandemi membuat semua orang kembali ke kebutuhan dasar (basic needs), yakni makan, minum, dan kesehatan. Namun, saat pandemi mulai terkendali, orang akan kembali berburu aktivitas hiburan (leisure), seperti berwisata dan kuliner. Di saat itulah tercipta momentum Post-Pandemic Rebound. Momentum itu jangan sampai lepas. Maka, Pemkab Banyuwangi telah menyiapkan tiga strategi pariwisata, Triple Track Strategy. Yakni, pariwisata yang makin digital, makin kreatif, dan makin sehat. Ini kita sebut 'tiga makin'. Makin digital, membuat pariwisata semakin mudah diakses. Misalnya, pembelian tiket secara online, penyelenggaraan event yang mulai beralih dari pertunjukan langsung menjadi virtual maupun hybrid (online dan offline), hingga penyediaan angkutan pariwisata gratis yang bisa dipesan secara daring. Di Banyuwangi juga telah menerapkan skrining pengunjung menggunakan aplikasi PeduliLindungi, termasuk destinasi alam yang notabene berada di desa, tapi tetap harus aspek digital untuk melindungi semuanya ini berjalan. Makin kreatif, dilakukan Pemkab Banyuwangi dengan terus berinovasi meningkatkan kualitas layanan kepada wisatawan. Salah satunya, menyiapkan layanan angkutan wisata gratis ke sejumlah destinasi wisata. Event-event baru juga kami galang, kolaborasi dengan banyak hal, seperti sepeda hingga selancar dan berbagai skema outdoor tourism yang kini diburu wisatawan karena dinilai lebih aman dan sehat. Tahun depan Banyuwangi menjadi tuan rumah World Surf League atas dukungan pemerintah pusat dan provinsi.

x. Anak-anak muda kreatif di Banyuwangi keliling desa-desa di 25 kecamatan se Kabupaten Banyuwangi. Puluhan anak muda yang tergabung dalam Banyuwangi Youth Creative Network (BYCN) itu melakukan branding potensi UMKM di desa-desa tersebut. BYCN merupakan kumpulan berbagai komunitas yang meliputi 17 sektor, seperti desain produk, fashion, film/video, fotografi, kerajinan, kuliner, sektor musik, sektor aplikasi, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan lainnya. Mereka berkumpul mengangkat berbagai potensi desa dengan menggelar pelatihan di berbagai sektor kreatif yang mengacu pada masing-masing potensi desa. Pelatihan yang melibatkan lebih dari 100 milenial setempat ini mengangkat potensi lokal desa tersebut. Mulai dari pelatihan berbagai olahan ikan, pengelolaan sampah, hingga digital branding produk UMKM setempat. Muncar dipilih karena potensinya sangat berlimpah, terutama potensi baharinya. Muncar sendiri dikenal sebagai pelabuhan ikan terbesar di Jawa sehingga BYCN tergerak untuk menggali dan mengangkat potensi tersebut. Untuk mengangkat potensi perikanan dan kelautan desa setempat, anak-anak muda ini dilatih membuat berbagai olahan ikan, seperti abon, nugget, kerupuk ikan, sup kerang, dan ikan pari kuah pedas. Pemkab Banyuwangi sendiri, terus memfasilitasi berbagai ruang anak-anak muda daerah untuk mengembangkan ekonomi kreatif, dengan pendekatan digitalisasi sehingga pelaku ekonomi kreatif dapat kian mahir teknologi.

y. Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pengairan Banyuwangi akan berupaya membuat sumur resapan di sejumlah titik yang menjadi langganan banjir. Ada 17 sumur resapan yang akan dibangun pada tahun ini. Fungsi sumur tersebut diharapkan bisa meminimalisasi terjadinya banjir. Ketika terjadi hujan dengan intensitas cukup tinggi mengakibatkan debit air sungai meningkat hingga masuk ke permukiman rumah warga. Banjir yang menggenangi ratusan rumah warga tersebut disebabkan intensitas hujan yang cukup tinggi dengan durasi cukup lama sehingga berdampak terhadap meningkatnya debit air sungai. Intensitas hujan mencapai 90 hingga 100 milimeter lebih dengan intensitas cukup tinggi. Untuk Sungai Bagong yang meluap, karena sungai tidak mampu menampung debit air yang cukup besar. Kapasitas atau daya tampung yang ada di Sungai Bagong tidak mampu menampung debit air karena hulu sungai terjadi hujan. Sungai meluap hingga ke permukiman warga, di sejumlah tempat lain juga sama. Kapasitas sungai tidak mampu menampung debit sungai yang tinggi. Riza menjelaskan, karakteristik Sungai Bagong yang

tidak lurus dan memiliki sejumlah cekungan tersebut mengakibatkan kawasan ini rentan banjir. Makanya, wilayah tersebut akan mendapatkan prioritas untuk dibangun sumur resapan. Ini upaya kita untuk mengantisipasi dan meminimalisasi terjadinya banjir serta menjaga ketersediaan air yang cukup untuk sektor pertanian di Banyuwangi. z. Pemkab Banyuwangi menyampaikan bahwa pembebasan lahan mengakibatkan jadwal pembangunan jalan tol Probolinggo-Banyuwangi (Probowangi) terus mengalami penyesuaian. Perkembangan terbaru, ruas terakhir dari bagian tol trans-Jawa itu baru akan mulai konstruksi pada pertengahan 2022. Saat ini anak usaha PT Jasa Marga pengelola jalan tol Probowangi, PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi (JPB), tengah berupaya menyelesaikan pembebasan lahan pada seksi 1 Probolinggo-Besuki. Panjangnya 29,6 kilometer. Hingga akhir Juli 2021, progres pembebasan lahan baru mencapai 24,88 persen. Sesuai jadwal, ditargetkan pembebasan tanah untuk seksi 1 dapat selesai pada akhir 2021. Dengan demikian, rencana pengerjaan konstruksi untuk seksi 1 ruas Probolinggo-Besuki dapat dimulai pada 2022. Jika semuanya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, target penyelesaian konstruksi untuk seksi 1 dapat rampung pada 2024. Karena pelaksanaan konstruksi belum dapat dimulai, kata Adi, saat ini fokus PT JPB ialah mendukung pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan lahan guna mempercepat proses pembebasan lahan untuk seksi 1 Probolinggo-Besuki. Agar target dari pengerjaan konstruksi bisa sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Saat ini yang menjadi prioritas PT JPB adalah seksi 1 ruas Probolinggo-Besuki dengan menyesuaikan rencana alokasi pendanaan tanah dari pemerintah. Meski demikian, pihaknya juga terus memonitor pembebasan lahan untuk seksi 2 yang akan membentang dari Besuki, Situbondo, hingga ke Bajulmati di Kabupaten Banyuwangi. Seksi 2 tersebut membentang sepanjang 110,9 km. aa. Menjamin ketersediaan pasokan komoditas pangan terutama untuk komoditas yang sering menjadi pemicu terjadinya inflasi. Dalam rangka mengawal peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi mengoptimalkan pelayanan konsultasi melalui Pelayanan Smart Konsultasi Pertanian Online atau disingkat Pas Kontan dan quick response E-BILAPERDU (Mobil Pelayanan Pertanian Terpadu) agar bisa memberikan solusi terbaik bagi para petani/peternak. bb. Dinas Pertanian dan Pangan secara intens juga melaksanakan Kegiatan Peningkatan Produktivitas Tanam Padi dengan penggunaan varietas unggul baru, pengembangan teknologi budidaya dan pencegahan alih fungsi lahan sawah (LP2B); serta Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana mendukung peningkatan produksi tanaman pangan melalui modernisasi alat dan mesin pertanian sekaligus gerakan pengendalian hama. cc. Peningkatan kompetensi SDM Pertanian, penguatan kelembagaan serta peningkatan kualitas produk tanaman pangan dilaksanakan melalui Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis berbasis industri digital 4.0, Rekrutmen Petugas Pendampingan Penyuluhan Pertanian mendukung Diseminasi Teknologi Pertanian di tingkat Kelompok Tani, serta Fasilitasi sertifikasi produk tanaman pangan. Para petani di Banyuwangi terus mendorong mengoptimalkan penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan). Seperti halnya yang dilakukan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Surangganti dari Desa Gladag, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi. Tak hanya memanfaatkan alsintan, mereka juga membentuk Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Tani Makmur. UPJA adalah lembaga ekonomi di pedesaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa dalam rangka optimalisasi penggunaan alsintan untuk memperoleh keuntungan usaha. UPJA ini langsung mendapat respon positif dari petani karena dinilai efektif dan efisien, mempersingkat waktu pekerjaan. Percepatan tanam yang dilakukan UPJA Tani Makmur sendiri mendapat pendampingan dari Dinas Pertanian dan Pangan. Petani yang menggunakan alsintan lebih dimudahkan dalam olah tanah, tanam, sampai panen. Penggunaan alsintan ini juga lebih efektif dan efisien. Petani tak perlu waktu lama dalam olah lahan, tanam dan panen. Cara kerja alsintan juga lebih efisien. Dengan memanfaatkan alsintan, petani bisa menghemat waktu dan uang. Begitu juga

dengan memanfaatkan Combine Harvester, petani bisa mendapat hasil panen yang lebih baik. Dengan melakukan modernisasi peralatan akan mendukung optimalisasi produksi pangan. dd. Dalam rangka menjaga stok daging, Dinas Pertanian dan Pangan membuka Pelayanan Kesehatan Gratis untuk Hewan Ternak Terpadu yang dilakukan di 25 kecamatan se-Banyuwangi. Saat ini Banyuwangi telah menjadi salah satu daerah yang memiliki populasi ternak terbesar di Jawa Timur khususnya sapi dan kambing. Populasi sapi potongnya ada 126.451 ekor dan kambing/domba sebanyak 205.328 ekor. Selain untuk dikonsumsi dalam daerah, sapi dan kambing/domba asal Banyuwangi ini juga dikirim ke kabupaten sekitar. Untuk mempertahankan populasi ini, harus dipastikan kalau ternak asal Banyuwangi itu sehat dan layak konsumsi. Karena itu, kesehatan ternak menjadi fokus utama lewat program pemeriksaan kesehatan agar ada jaminan kesehatan hewan ternak pada masyarakat. Berbagai pelayanan kesehatan hewan bisa diikuti para peternak. Mulai penyuluhan kesehatan hewan, pengobatan, hingga pemeriksaan kebuntingan bisa diikuti peternak tanpa dikenakan biaya. ee. Untuk memastikan ketercukupan hewan kurban, Dinas Pertanian dan Pangan melakukan sidak penjual hewan kurban. Agar kualitas hewan kurban terjaga, Dinas Pertanian melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pedagang hewan ternak yang tersebar di beberapa tempat. Tahun ini stok kambing untuk kurban di Banyuwangi yang dijual oleh pedagang-pedagang di pinggir jalan berjumlah 389 ekor. Total ada 15 pedagang. Jumlahnya tidak terlalu banyak karena banyak masyarakat yang langsung mencari ke peternak atau beberapa sentra kambing seperti di Kelurahan Gombongsari, Kecamatan Kalipuro. Berdasarkan data yang dimiliki Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi, populasi kambing/domba di Banyuwangi saat ini mencapai 205.328 ekor. Dari jumlah tersebut, 13 ribu populasi kambing terpusat di Gombongsari. Stok kambing layak kurban mencapai 7500 ekor. Sementara untuk populasi sapi mencapai 126.451 ekor. Dari angka tersebut, Kabupaten Banyuwangi sudah bisa menyuplai kebutuhan kambing dan sapi untuk daerah lain. Banyuwangi sudah menjadi penyuplai bibit kambing ke Bali dan daerah lain. ff. Untuk menjaga stabilisasi harga dan pasokan pangan, Dinas Pertanian dan Pangan juga melaksanakan Kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan melalui pemanfaatan lahan pekarangan/ lahan tidur untuk komoditi sayuran, buah-buahan, ternak dan ikan sesuai potensi sumberdaya lokal dilaksanakan. gg. Untuk meningkatkan produksi ikan air tawar, Dinas Perikanan melaksanakan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Perikanan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, berupa: 1) Pelatihan Budidaya Ikan Lele dengan Kolam Terpal 2) Pelatihan Budidaya Ikan Sistem Mina Padi 3) Demplot Budidaya Ikan Air Tawar Sistem Bioflok 4) Pelatihan Budidaya Ikan Lele Sistem Bioflok 5) Pelatihan Budidaya Ikan bagi Pembudidaya Ikan Air Tawar 6) Pengendalian Hama Penyakit dan Penanganan Kualitas Lingkungan Budidaya Ikan 7) Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan 8) Pendampingan pada Kelompok Usaha Pembenihan Rakyat 9) Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pengembangan Kawasan Budidaya Air Payau 10) Normalisasi Saluran Tambak 11) Pembangunan Jalan Produksi Tambak hh. Dinas Pertanian dan Pangan juga berkolaborasi dengan Tim Penggerak PKK Banyuwangi untuk mendorong peningkatan ketahanan pangan daerah dan keluarga sebagai solusi kunci menghadapi pandemi Covid-19 sekaligus memulihkan ekonomi lokal. Meski Banyuwangi relatif aman karena pasokan pangan cukup berlebih, tetap diperlukan antisipasi semua pihak terutama dalam memperbaiki aspek permintaan atau daya beli warga yang terpukul saat ini. Terlebih, belum ada yang tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Oleh karena itu, didoronglah sejumlah langkah untuk membangun ketahanan pangan keluarga. Dinas Pertanian dan Pangan melalui PKK mulai membagikan bibit tanaman kepada para kader PKK untuk mendukung ketahanan pangan keluarga. Untuk mengurangi risiko penurunan ketahanan pangan, PKK mendorong serta memfasilitasi pemanfaatan lahan pekarangan sebagai salah satu solusi pangan mandiri, termasuk untuk

budidaya ikan. Ada pula pembagian bibit disesuaikan dengan kebutuhan, misalnya sayuran dengan masa panen singkat. Keanekaragaman pangan berbasis potensi lokal juga wajib diperhatikan. Pembelian bahan pangan lokal juga digiatkan untuk mendukung kesejahteraan pelaku pertanian. Program-program kolaboratif semacam itu menunjukkan, kerja gotong royong adalah kunci menjaga sistem ketahanan pangan daerah. ii. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan melakukan secara rutin pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya dengan melibatkan para Petugas Monitoring Harga dan Petugas Monitoring Perdagangan Antar Daerah dan Antar Pulau. Kegiatan survey harga juga melibatkan BPS Banyuwangi guna sinkronisasi harga yang ada di pasaran. jj. Menginformasikan data harian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya yang diperoleh melalui media cetak, media elektronik, media sosial dan sarana televisi di pasar-pasar tradisional serta videotron di area publik. Data tersebut juga bisa dilihat melalui www.tpid.banyuwangikab.go.id yang terkoneksi dengan SISKAPERBAPO (Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok) sebagai sistem informasi harga pangan berbasis web untuk area Jawa Timur yang berisi informasi harga kebutuhan pokok yang diupdate secara harian. kk. Pemkab Banyuwangi melalui Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Permukiman terus berupaya mempercantik area perkotaan sebagai daya tarik bagi investor dan wisatawan. Salah satunya melakukan pavingisasi di sejumlah ruas jalan. Pemasangan tersebut menyisir sejumlah tempat umum dan jalan perkotaan. Setidaknya ada 95 titik pemasangan paving, mulai dari tempat pelayanan publik hingga sekolah. Paving yang dipasang dengan lebar 2 meter dari ruas jalan itu juga untuk membuat pemandangan kota Banuwangi bersih dan rapi. Pembangunan infrastruktur untuk menjadikan jalan kabupaten Banyuwangi terlihat bersih dan lebih indah. pemasangan paving tersebut memang hampir seluruhnya dipasang. Namun, karena terkendala dengan pandemi Covid-19 masih ada beberapa titik yang belum dipasang. Kita terkendala dengan anggaran, karena beberapa anggaran dialihkan untuk penanganan Covid-19. ll. Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pengairan Kabupaten Banyuwangi membuat Vertical Garden atau taman vertikal di jembatan-jembatan memiliki Dwi fungsi, yakni memperindah jembatan dan juga sebagai tindakan pencegahan pembuangan sampah ke aliran sungai dari atas jembatan. Disamping jembatan dipasang pembatas dari paranet atau jaring dan ratusan tanaman hias membuat area di sekitar jembatan tampak apik dan menarik. Apalagi bunga-bunga yang cantik yang ditanam dalam pot kecil menambah indah pemandangannya. Sejak diberi Vertical garden, masyarakat tidak lagi membuang sampah dari atas jembatan. Setelah ada pembatas berbentuk taman vertikal, kebiasaan orang membuang sampah ke sungai dari atas jembatan turun signifikan dan cenderung tidak ada. Pemasangan vertical garden merupakan bagian dari kegiatan konservasi sumber daya air, yang sifatnya sebagai tindakan pencegahan masyarakat tidak membuang sampah sembarang terutama membuang sampah lewat jembatan. Selain sebagai pencegah masyarakat membuang sampah dialiran sungai, vertical garden juga sebagai penambah keindahan jembatan. Pemasangan vertical garden ini sangat efektif untuk mengurangi sampah di aliran sungai. Untuk itu, vertical garden dengan jaring dari paranet dipasang di atas jembatan dengan panjang sekitar 10 Meter dan ketinggian 2 Meter, menyesuaikan kawasan sekitar jembatan. Untuk menambah keindahan setiap titik vertical garden dipasang juga pot bunga, yang berisikan 100 hingga 150 pot bunga hidup. mm. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi juga melaksanakan Optimalisasi Perdagangan Dalam Negeri melalui Monitoring Arus Perdagangan Antar Daerah lewat beberapa titik pantau, yaitu ASDP, Pelabuhan Tanjung Wangi, Muncar, Boom, LCM dan pelaku usaha perdagangan antar daerah/pulau di kecamatan-kecamatan serta melalui Pelaporan Online PAP2D. nn. Untuk memperlancar arus distribusi barang dan jasa Dinas Perhubungan melakukan Peningkatan Pembangunan Penerangan Jalan Umum serta Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum.

Pembangunan 7.387 titik lampu dan perawatan rutin sejumlah 25.000 titik sebagai upaya penyediaan LPJU yang lengkap mampu menunjang kelancaran proses distribusi barang maupun penumpang. oo. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas dilaksanakan dengan kegiatan Penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan berupa rambu-rambu lalu lintas sebanyak 1.900 titik. Penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan meliputi rambu-rambu lalu lintas, guardrail, paku marka dll. Bertujuan untuk menunjang kelancaran lalu lintas dan keselamatan jalan sehingga pelaksanaan distribusi barang maupun jasa mendapatkan jaminan ketepatan waktu. pp. Untuk menertibkan penggunaan LPG tabung 3 kilogram, Bupati mengeluarkan Surat Edaran No:510/876/429.021/2021 tentang Penggunaan LPG Tabung 3 Kilogram Bersubsidi Tepat Sasaran. Dengan adanya Surat Edaran ini diharapkan para ASN dan warga masyarakat yang mampu tidak lagi menggunakan LPG Tabung 3 kilogram. qq. Melakukan analisa sumber dan potensi tekanan inflasi yang terjadi pada bulan sebelumnya dan upaya pengendalian inflasi pada bulan berjalan dengan rekomendasi Ketua TPID kepada anggota TPID agar melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk pengendalian inflasi. rr. Menyusun kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Banyuwangi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi di Provinsi Jawa Timur.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Banyuwangi pada Triwulan III Tahun 2021 adalah sebagai berikut: a. Diperlukan adanya penguatan koordinasi antara segenap anggota TPID Kabupaten Banyuwangi untuk menjamin ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif dalam upaya pengendalian inflasi. b. Melaksanakan evaluasi penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa - Bali mulai diterapkan di Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 3 Juli 2021. c. Mendukung penetapan Kabupaten Banyuwangi ditunjuk sebagai daerah penyangga komoditas cabai rawit nasional oleh Kementerian Pertanian untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan harga cabai rawit di masa mendatang, khususnya saat musim penghujan. d. Mendorong antusiasme anak muda Banyuwangi untuk menggeluti bisnis pertanian dengan segala subsektornya melalui program "Jagoan Tani" Banyuwangi, sebuah ajang untuk menciptakan generasi baru usaha pertanian dengan sentuhan inovasi dan digitalisasi. e. Mengapresiasi para pelaku usaha yang memanfaatkan marketing online via media sosial dan aplikasi online. Pembayaran juga dilakukan secara cashless untuk menghindari kontak dengan pelanggan. f. Melaksanakan Gerakan Hari Belanja ke Pasar Rakyat dan UMKM pada tanggal cantik 7.7, 8.8 dan 9.9 untuk mendukung para pelaku usaha dan pedagang pasar yang sangat terdampak saat pandemi. Hari Belanja ke Pasar dan UMKM ini adalah gerakan gotong royong di Banyuwangi untuk membantu pemulihan ekonomi. g. Memberikan dana bantuan uang tunai kepada ribuan warung kecil/PKL yang jam operasionalnya harus dibatasi pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat 3-20 Juli. h. Menggalang gerakan untuk membantu membeli dagangan warung kecil/pedagang keliling/PKL yang jam operasionalnya harus dibatasi pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat 3-20 Juli. i. Terus mengintensifkan vaksinasi Covid-19 kepada para pelaku usaha ultra mikro, termasuk PKL, pedagang keliling, dan warung-warung kecil sebagai bentuk komitmen perlindungan ekonomi arus bawah di Banyuwangi. j. Melakukan konsolidasi dengan berbagai stakeholder dalam penanganan pandemi Covid-19 sekaligus pemulihan ekonomi yang sangat terpuruk akibat pandemi, salah satunya dengan menggandeng kampus-kampus di Banyuwangi agar turut mengambil peran, baik dalam bidang-bidang medis maupun non-medis. k. Mengakomodir Usaha mikro di Banyuwangi agar bisa menerima Bantuan Produktif Usaha

Mikro (BPUM). Para penerima diharapkan bisa memanfaatkan bantuan tersebut untuk penguatan modal usaha dan jangan dipakai untuk konsumtif. l. Mengajak asosiasi dunia usaha seperti Kadin, Hipmi, Apersi, REI Banyuwangi dan Gapeknas untuk berkolaborasi mendorong pemulihan ekonomi. Asosiasi dunia usaha sebagai mitra strategis dalam pemulihan ekonomi Banyuwangi berperan aktif membantu Pemkab Banyuwangi dalam mengatasi permasalahan dan dampak dari pandemi. m. Terus menggulirkan Program "Warung Naik Kelas" (Wenak) sebagai fasilitasi warung-warung rakyat untuk "naik kelas", dengan peralatan yang lebih memadai, melalui dukungan dari pemerintah daerah. n. Melakukan berbagai upaya pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pedesaan yang dilakukan keroyokan lintas OPD untuk mendorong terus upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang salah satunya berhubungan dengan kemampuan daya beli masyarakat. o. Selain Jagoan Tani, Pemkab Banyuwangi juga meluncurkan program "Jagoan Bisnis" untuk mencetak ratusan anak muda setempat menjadi pengusaha muda. Jagoan Bisnis adalah salah satu wujud optimisme daerah untuk memulihkan ekonomi di tengah kondisi sulit akibat pandemi Covid-19. Bertambahnya pengusaha, diharapkan bisa mendorong tumbuhnya perekonomian di Banyuwangi. p. Mengoptimalkan penyerapan APBD Banyuwangi karena percepatan penyerapan APBD ini adalah untuk menjaga pergerakan ekonomi lokal. Di tengah dunia usaha yang melambat karena pandemi, APBD menjadi instrumen yang bisa berperan menggerakkan ekonomi. q. Mendukung pemanfaatan inovasi Puting Sinaga (Penggunaan Lampu Tingkatkan Produksi Buah Naga), yang merupakan teknologi tepat guna dengan penggunaan lampu di kebun buah naga pada malam hari, untuk merangsang pembungaan. Berkat inovasi ini, buah naga para petani dapat menghasilkan banyak buah, sehingga petani dapat melakukan panen buah naga di luar musim atau off season. r. Mendukung investasi Brandon Collins dari Australia untuk pengembangan sapi perah di Banyuwangi dengan serapan tenaga kerja lokal dan berkonsep agrowisata edukasi yang berbasis kearifan lokal. s. Mengembangkan pertanian organik di Banyuwangi agar bisa menembus pasar di luar negeri. t. Melaksanakan Festival Pangan Non Beras (Fepanora) dengan tema Penganekaragaman Pangan untuk Kesejahteraan Masyarakat (PPKM). Festival ini juga bentuk dukungan Pemkab Banyuwangi terhadap program diversifikasi pangan yang dilakukan Kementerian Pertanian sejak 2020 lalu. u. Mendukung Banyuwangi yang telah dikenal menjadi salah satu sentra penghasil buah naga. v. Mendukung strategi pemulihan ekonomi khususnya di bidang pariwisata, yaitu Triple Track Strategy. Yakni, pariwisata yang makin digital, makin kreatif, dan makin sehat, yang disebut 'tiga makin', makin digital, makin kreatif dan makin sehat. w. Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pengairan Banyuwangi meminimalisasi terjadinya banjir dengan pembuatan sumur resapan di sejumlah titik yang menjadi langganan banjir. Ada 17 sumur resapan yang dibangun pada tahun ini. Ini upaya kita untuk mengantisipasi dan meminimalisasi terjadinya banjir serta menjaga ketersediaan air yang cukup untuk sektor pertanian di Banyuwangi. x. Menjamin ketersediaan pasokan komoditas pangan terutama untuk komoditas yang sering menjadi pemicu terjadinya inflasi. Dalam rangka mengawal peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi mengoptimalkan pelayanan konsultasi melalui Pelayanan Smart Konsultasi Pertanian Online atau disingkat Pas Kontan dan quick response E-BILAPERDU (Mobil Pelayanan Pertanian Terpadu) agar bisa memberikan solusi terbaik bagi para petani/peternak. y. Dinas Pertanian dan Pangan secara intens juga melaksanakan Kegiatan Peningkatan Produktivitas Tanam Padi dengan penggunaan varietas unggul baru, pengembangan teknologi budidaya dan pencegahan alih fungsi lahan sawah (LP2B); serta Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana mendukung peningkatan produksi tanaman pangan melalui modernisasi alat dan mesin pertanian sekaligus gerakan pengendalian hama. z. Meningkatkan kompetensi SDM Pertanian, menguatkan kelembagaan serta meningkatkan kualitas produk tanaman pangan dilaksanakan melalui

Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis berbasis industri digital 4.0, Rekrutmen Petugas Pendampingan Penyuluhan Pertanian, mendukung Diseminasi Teknologi Pertanian di tingkat Kelompok Tani, serta Fasilitasi sertifikasi produk tanaman pangan. aa. Membuka Pelayanan Kesehatan Gratis untuk Hewan Ternak Terpadu yang dilakukan di 25 kecamatan se-Banyuwangi dalam rangka menjaga stok daging. Saat ini Banyuwangi telah menjadi salah satu daerah yang memiliki populasi ternak terbesar di Jawa Timur khususnya sapi dan kambing. bb. Melakukan inspeksi mendadak (sidak) penjual hewan kurban untuk memastikan ketercukupan hewan kurban, agar kualitas hewan kurban terjaga. cc. Untuk menjaga stabilisasi harga dan pasokan pangan, Dinas Pertanian dan Pangan juga melaksanakan Kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan melalui pemanfaatan lahan pekarangan/ lahan tidur untuk komoditi sayuran, buah-buahan, ternak dan ikan sesuai potensi sumberdaya lokal dilaksanakan. dd. Untuk meningkatkan produksi ikan air tawar, Dinas Perikanan melaksanakan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Perikanan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, berupa: 1) Pelatihan Budidaya Ikan Lele dengan Kolam Terpal 2) Pelatihan Budidaya Ikan Sistem Mina Padi 3) Demplot Budidaya Ikan Air Tawar Sistem Bioflok 4) Pelatihan Budidaya Ikan Lele Sistem Bioflok 5) Pelatihan Budidaya Ikan bagi Pembudidaya Ikan Air Tawar 6) Pengendalian Hama Penyakit dan Penanganan Kualitas Lingkungan Budidaya Ikan 7) Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan 8) Pendampingan pada Kelompok Usaha Pembenihan Rakyat 9) Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pengembangan Kawasan Budidaya Air Payau 10) Normalisasi Saluran Tambak 11) Pembangunan Jalan Produksi Tambak ee. Mendorong peningkatan ketahanan pangan daerah dan keluarga sebagai solusi kunci menghadapi pandemi Covid-19 sekaligus memulihkan ekonomi lokal. Untuk mengurangi risiko penurunan ketahanan pangan, mendorong serta memfasilitasi pemanfaatan lahan pekarangan sebagai salah satu solusi pangan mandiri, termasuk untuk budidaya ikan. ff. Melakukan secara rutin pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya dengan melibatkan para Petugas Monitoring Harga dan Petugas Monitoring Perdagangan Antar Daerah dan Antar Pulau. Kegiatan survey harga juga melibatkan BPS Banyuwangi guna sinkronisasi harga yang ada di pasaran. gg. Menginformasikan data harian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya yang diperoleh melalui media cetak, media elektronik, media sosial dan sarana televisi di pasar-pasar tradisional serta videotron di area publik. Data tersebut juga bisa dilihat melalui www.tpid.banyuwangikab.go.id yang terkoneksi dengan SISKAPERBAPO (Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok) sebagai sistem informasi harga pangan berbasis web untuk area Jawa Timur yang berisi informasi harga kebutuhan pokok yang diupdate secara harian. hh. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Permukiman terus berupaya mempercantik area perkotaan sebagai daya tarik bagi investor dan wisatawan. Salah satunya melakukan pavingisasi di sejumlah ruas jalan, tempat umum dan jalan perkotaan. ii. Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pengairan Kabupaten Banyuwangi membuat Vertical Garden atau taman vertikal di jembatan-jembatan memiliki Dwi fungsi, yakni memperindah jembatan dan juga sebagai tindakan pencegahan pembuangan sampah ke aliran sungai dari atas jembatan. jj. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi juga melaksanakan Optimalisasi Perdagangan Dalam Negeri melalui Monitoring Arus Perdagangan Antar Daerah lewat beberapa titik pantau, yaitu ASDP, Pelabuhan Tanjung Wangi, Muncar, Boom, LCM dan pelaku usaha perdagangan antar daerah/pulau di kecamatan-kecamatan serta melalui Pelaporan Online PAP2D. kk. Untuk menertibkan penggunaan LPG tabung 3 kilogram, Bupati mengeluarkan Surat Edaran No:510/876/429.021/2021 tentang Penggunaan LPG Tabung 3 Kilogram Bersubsidi Tepat Sasaran. Dengan adanya Surat Edaran ini diharapkan para ASN dan warga masyarakat yang mampu tidak lagi menggunakan LPG Tabung 3 kilogram. ll. Melakukan analisa sumber dan potensi tekanan inflasi yang terjadi pada

bulan sebelumnya dan upaya pengendalian inflasi pada bulan berjalan dengan rekomendasi Ketua TPID kepada anggota TPID agar melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk pengendalian inflasi. mm. Menyusun kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Banyuwangi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi di Provinsi Jawa Timur. nn. Dinas Perindustrian dan Perdagangan terus melaksanakan kegiatan Monitoring harga 9 (sembilan) bahan pokok dan bahan penting lainnya di 15 pasar se-Kabupaten Banyuwangi serta monitoring perdagangan antar daerah/pulau. oo. Pemkab Banyuwangi dengan menggandeng platform pembayaran digital DANA, Link Aja, OVO, Gopay dan Paytren (Osing Pay) mampu memberikan dukungan digitalisasi bagi 1.0000 usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) di Banyuwangi untuk mengakselerasi ekonomi dalam rangka pemulihan di masa pandemi Covid-19. UMKM yang diakselerasi akan tumbuh menjadi basis penyerapan tenaga kerja. UMKM Banyuwangi juga sangat berpotensi dalam mendorong perekonomian agar semakin inklusif. pp. Dinas Perhubungan melakukan Peningkatan Pembangunan Penerangan Jalan Umum serta Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum berupa Pembangunan 7.387 titik lampu dan perawatan rutin sejumlah 25.000 titik sebagai upaya penyediaan LPJU yang lengkap sehingga mampu menunjang kelancaran proses distribusi barang maupun penumpang. qq. Dinas Perhubungan yang melakukan pemasangan Early Warning System di 24 Perlintasan Sebidang sangat bermanfaat dalam menunjang keselamatan serta memperlancar proses distribusi barang maupun angkutan orang. rr. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas yang dilaksanakan dengan kegiatan Penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan berupa rambu-rambu lalu lintas sebanyak 1.900 titik, bermanfaat untuk menunjang kelancaran lalu lintas dan keselamatan jalan sehingga pelaksanaan distribusi barang maupun jasa mendapatkan jaminan ketepatan waktu. ss. Melakukan analisa sumber dan potensi tekanan inflasi yang terjadi pada bulan sebelumnya dan upaya pengendalian inflasi pada bulan berjalan dengan rekomendasi Ketua TPID kepada anggota TPID agar melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk pengendalian inflasi. tt. Menyusun kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Banyuwangi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi di Provinsi Jawa Timur.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Banyuwangi pada Triwulan III Tahun 2021 adalah sebagai berikut: a. Dinas Pertanian dan Pangan: 1) Harus terus mendorong produktivitas pertanian pangan serta sektor peternakan. Selain dengan menggunakan teknologi terkini, juga dengan menjalin sinergi bersama para stakeholder yang turut berperan di bidang pertanian dan peternakan. 2) Mengoptimalkan peran PAS KONTAN dan E-BILAPERDU sehingga mampu menjangkau semua petani dan peternak yang tersebar di seluruh pelosok Kabupaten Banyuwangi. 3) Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Pertanian melakukan sidak hewan kurban untuk membantu menyediakan komoditas ternak yang sehat dan memenuhi syarat sebagai hewan kurban. 4) Diperlukan adanya penguatan koordinasi antara segenap anggota TPID Kabupaten Banyuwangi untuk menjamin ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif dalam upaya pengendalian inflasi. 5) Mendukung penetapan Kabupaten Banyuwangi ditunjuk sebagai daerah penyangga komoditas cabai rawit nasional oleh Kementerian Pertanian untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan harga cabai rawit di masa mendatang, khususnya saat musim penghujan. 6) Mendorong antusiasme anak muda Banyuwangi untuk menggeluti bisnis pertanian dengan segala subsektornya melalui program "Jagoan Tani" Banyuwangi, sebuah ajang untuk menciptakan generasi baru usaha pertanian dengan sentuhan inovasi dan digitalisasi. 7) Menggalang gerakan untuk membantu membeli dagangan warung

kecil/pedagang keliling/PKL yang jam operasionalnya harus dibatasi pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat 3-20 Juli. 8) Melakukan konsolidasi dengan berbagai stakeholder dalam penanganan pandemi Covid-19 sekaligus pemulihan ekonomi yang sangat terpuruk akibat pandemi, salah satunya dengan menggandeng kampus-kampus di Banyuwangi agar turut mengambil peran, baik dalam bidang-bidang medis maupun non-medis. 9) Mengoptimalkan penyerapan APBD Banyuwangi karena percepatan penyerapan APBD ini adalah untuk menjaga pergerakan ekonomi lokal. Di tengah dunia usaha yang melambat karena pandemi, APBD menjadi instrumen yang bisa berperan menggerakkan ekonomi. 10) Mendukung pemanfaatan inovasi Puting Sinaga (Penggunaan Lampu Tingkatkan Produksi Buah Naga), yang merupakan teknologi tepat guna dengan penggunaan lampu di kebun buah naga pada malam hari, untuk merangsang pembungaan. Berkat inovasi ini, buah naga para petani dapat menghasilkan banyak buah, sehingga petani dapat melakukan panen buah naga di luar musim atau off season. 11) Mendukung investasi Brandon Collins dari Australia untuk pengembangan sapi perah di Banyuwangi dengan serapan tenaga kerja lokal dan berkonsep agrowisata edukasi yang berbasis kearifan lokal. 12) Mengembangkan pertanian organik di Banyuwangi agar bisa menembus pasar di luar negeri. 13) Melaksanakan Festival Pangan Non Beras (Fepanora) dengan tema Penganekaragaman Pangan untuk Kesejahteraan Masyarakat (PPKM). Festival ini juga bentuk dukungan Pemkab Banyuwangi terhadap program diversifikasi pangan yang dilakukan Kementerian Pertanian sejak 2020 lalu. 14) Mendukung Banyuwangi yang telah dikenal menjadi salah satu sentra penghasil buah naga. 15) Menjamin ketersediaan pasokan komoditas pangan terutama untuk komoditas yang sering menjadi pemicu terjadinya inflasi. Dalam rangka mengawal peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan. 16) Melaksanakan Kegiatan Peningkatan Produktivitas Tanam Padi dengan penggunaan varietas unggul baru, pengembangan teknologi budidaya dan pencegahan alih fungsi lahan sawah (LP2B); serta Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana mendukung peningkatan produksi tanaman pangan melalui modernisasi alat dan mesin pertanian sekaligus gerakan pengendalian hama. 17) Meningkatkan kompetensi SDM Pertanian, menguatkan kelembagaan serta meningkatkan kualitas produk tanaman pangan dilaksanakan melalui Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis berbasis industri digital 4.0, Rekrutmen Petugas Pendampingan Penyuluhan Pertanian, mendukung Diseminasi Teknologi Pertanian di tingkat Kelompok Tani, serta Fasilitasi sertifikasi produk tanaman pangan. 18) Membuka Pelayanan Kesehatan Gratis untuk Hewan Ternak Terpadu yang dilakukan di 25 kecamatan se-Banyuwangi dalam rangka menjaga stok daging. Saat ini Banyuwangi telah menjadi salah satu daerah yang memiliki populasi ternak terbesar di Jawa Timur khususnya sapi dan kambing. 19) Melakukan inspeksi mendadak (sidak) penjual hewan kurban untuk memastikan ketercukupan hewan kurban, agar kualitas hewan kurban terjaga. 20) Untuk menjaga stabilisasi harga dan pasokan pangan, Dinas Pertanian dan Pangan juga melaksanakan Kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan melalui pemanfaatan lahan pekarangan/ lahan tidur untuk komoditi sayuran, buah-buahan, ternak dan ikan sesuai potensi sumberdaya lokal dilaksanakan. 21) Mendorong peningkatan ketahanan pangan daerah dan keluarga sebagai solusi kunci menghadapi pandemi Covid-19 sekaligus memulihkan ekonomi lokal. Untuk mengurangi risiko penurunan ketahanan pangan, mendorong serta memfasilitasi pemanfaatan lahan pekarangan sebagai salah satu solusi pangan mandiri, termasuk untuk budidaya ikan. 22) Melakukan analisa sumber dan potensi tekanan inflasi yang terjadi pada bulan sebelumnya dan upaya pengendalian inflasi pada bulan berjalan dengan rekomendasi Ketua TPID kepada anggota TPID agar melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk pengendalian inflasi. 23) Menyusun kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Banyuwangi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi di Provinsi Jawa Timur. b. Dinas Perikanan: 1) Meningkatkan produksi

ikan air tawar, Dinas Perikanan melaksanakan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Perikanan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, berupa: a) Pelatihan Budidaya Ikan Lele dengan Kolam Terpal b) Pelatihan Budidaya Ikan Sistem Mina Padi c) Demplot Budidaya Ikan Air Tawar Sistem Bioflok d) Pelatihan Budidaya Ikan Lele Sistem Bioflok e) Pelatihan Budidaya Ikan bagi Pembudidaya Ikan Air Tawar f) Pengendalian Hama Penyakit dan Penanganan Kualitas Lingkungan Budidaya Ikan g) Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan h) Pendampingan pada Kelompok Usaha Pembenihan Rakyat i) Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pengembangan Kawasan Budidaya Air Payau j) Normalisasi Saluran Tambak k) Pembangunan Jalan Produksi Tambak c. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan: 1) Mewaspadai fluktuasi harga dengan memahami mekanisme pasar nasional sehingga bisa mengambil langkah yang tepat disaat terjadi gejolak harga. 2) Terus melakukan monitoring harga harian dan pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya di Kabupaten Banyuwangi agar harga barang tetap terkendali. 3) Melakukan koordinasi dengan Dinas Kominfo dan Persandian untuk mengintensifkan penyampaian informasi terkait inflasi dan perkembangan terbaru harga komoditas dari hari ke hari, baik melalui videotron serta media cetak dan elektronik. 4) Melaksanakan Optimalisasi Perdagangan Dalam Negeri melalui Monitoring Arus Perdagangan Antar Daerah lewat beberapa titik pantau, yaitu ASDP, Pelabuhan Tanjung Wangi, Muncar, Boom, LCM dan pelaku usaha perdagangan antar daerah/pulau di kecamatan-kecamatan serta melalui Pelaporan Online PAP2D. 5) Demi tersedianya Data Komoditas yang disimpan dalam gudang di Banyuwangi, melaksanakan monitoring, pembinaan dan penataan pergudangan di Kabupaten Banyuwangi. 6) Diperlukan adanya penguatan koordinasi antara segenap anggota TPID Kabupaten Banyuwangi untuk menjamin ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif dalam upaya pengendalian inflasi. 7) Melaksanakan evaluasi penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa - Bali mulai diterapkan di Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 3 Juli 2021. 8) Mengapresiasi para pelaku usaha yang memanfaatkan marketing online via media sosial dan aplikasi online. Pembayaran juga dilakukan secara cashless untuk menghindari kontak dengan pelanggan. 9) Melaksanakan Gerakan Hari Belanja ke Pasar Rakyat dan UMKM pada tanggal 7.7, 8.8 dan 9.9 untuk mendukung para pelaku usaha dan pedagang pasar yang sangat terdampak saat pandemi. Hari Belanja ke Pasar dan UMKM ini adalah gerakan gotong royong di Banyuwangi untuk membantu pemulihan ekonomi. 10) Memberikan dana bantuan uang tunai kepada ribuan warung kecil/PKL yang jam operasionalnya harus dibatasi pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat 3-20 Juli. 11) Menggalang gerakan untuk membantu membeli dagangan warung kecil/pedagang keliling/PKL yang jam operasionalnya harus dibatasi pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat 3-20 Juli. 12) Terus mengintensifkan vaksinasi Covid-19 kepada para pelaku usaha ultra mikro, termasuk PKL, pedagang keliling, dan warung-warung kecil sebagai bentuk komitmen perlindungan ekonomi arus bawah di Banyuwangi. 13) Melakukan konsolidasi dengan berbagai stakeholder dalam penanganan pandemi Covid-19 sekaligus pemulihan ekonomi yang sangat terpuruk akibat pandemi, salah satunya dengan menggandeng kampus-kampus di Banyuwangi agar turut mengambil peran, baik dalam bidang-bidang medis maupun non-medis. 14) Mengakomodir Usaha mikro di Banyuwangi agar bisa menerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Para penerima diharapkan bisa memanfaatkan bantuan tersebut untuk penguatan modal usaha dan jangan dipakai untuk konsumtif. 15) Mengajak asosiasi dunia usaha seperti Kadin, Hipmi, Apersi, REI Banyuwangi dan Gapeknas untuk berkolaborasi mendorong pemulihan ekonomi. Asosiasi dunia usaha sebagai mitra strategis dalam pemulihan ekonomi Banyuwangi berperan aktif membantu Pemkab Banyuwangi dalam mengatasi permasalahan dan dampak dari pandemi. 16) Terus menggulirkan Program "Warung Naik

Kelas” (Wenak) sebagai fasilitasi warung-warung rakyat untuk “naik kelas”, dengan peralatan yang lebih memadai, melalui dukungan dari pemerintah daerah. 17) Melakukan berbagai upaya pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pedesaan yang dilakukan keroyokan lintas OPD untuk mendorong terus upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang salah satunya berhubungan dengan kemampuan daya beli masyarakat. 18) Mengoptimalkan penyerapan APBD Banyuwangi karena percepatan penyerapan APBD ini adalah untuk menjaga pergerakan ekonomi lokal. Di tengah dunia usaha yang melambat karena pandemi, APBD menjadi instrumen yang bisa berperan menggerakkan ekonomi. 19) Mendukung strategi pemulihan ekonomi khususnya di bidang pariwisata, yaitu Triple Track Strategy. Yakni, pariwisata yang makin digital, makin kreatif, dan makin sehat, yang disebut ‘tiga makin’, makin digital, makin kreatif dan makin sehat. 20) Melakukan secara rutin pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya dengan melibatkan para Petugas Monitoring Harga dan Petugas Monitoring Perdagangan Antar Daerah dan Antar Pulau. Kegiatan survey harga juga melibatkan BPS Banyuwangi guna sinkronisasi harga yang ada di pasaran. 21) Menginformasikan data harian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya yang diperoleh melalui media cetak, media elektronik, media sosial dan sarana televisi di pasar-pasar tradisional serta videotron di area publik. Data tersebut juga bisa dilihat melalui www.tpid.banyuwangikab.go.id yang terkoneksi dengan SISKAPERBAPO (Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok) sebagai sistem informasi harga pangan berbasis web untuk area Jawa Timur yang berisi informasi harga kebutuhan pokok yang diupdate secara harian. 22) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi juga melaksanakan Optimalisasi Perdagangan Dalam Negeri melalui Monitoring Arus Perdagangan Antar Daerah lewat beberapa titik pantau, yaitu ASDP, Pelabuhan Tanjung Wangi, Muncar, Boom, LCM dan pelaku usaha perdagangan antar daerah/pulau di kecamatan-kecamatan serta melalui Pelaporan Online PAP2D. 23) Untuk menertibkan penggunaan LPG tabung 3 kilogram, Bupati mengeluarkan Surat Edaran No:510/876/429.021/2021 tentang Penggunaan LPG Tabung 3 Kilogram Bersubsidi Tepat Sasaran. Dengan adanya Surat Edaran ini diharapkan para ASN dan warga masyarakat yang mampu tidak lagi menggunakan LPG Tabung 3 kilogram. 24) Dinas Koperasi, UM dan Perdagangan terus melaksanakan kegiatan Monitoring harga 9 (sembilan) bahan pokok dan bahan penting lainnya di 15 pasar se-Kabupaten Banyuwangi serta monitoring perdagangan antar daerah/pulau. 25) Menggandeng platform pembayaran digital DANA, Link Aja, OVO, Gopay dan Paytren (Osing Pay) agar mampu memberikan dukungan digitalisasi bagi 1.0000 usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) di Banyuwangi untuk mengakselerasi ekonomi dalam rangka pemulihan di masa pandemi Covid-19. UMKM yang diakselerasi akan tumbuh menjadi basis penyerapan tenaga kerja. UMKM Banyuwangi juga sangat berpotensi dalam mendorong perekonomian agar semakin inklusif. 26) Melakukan analisa sumber dan potensi tekanan inflasi yang terjadi pada bulan sebelumnya dan upaya pengendalian inflasi pada bulan berjalan dengan rekomendasi Ketua TPID kepada anggota TPID agar melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk pengendalian inflasi. 27) Menyusun kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Banyuwangi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi di Provinsi Jawa Timur. d. Dinas Perhubungan: 1) Terus memantau proses kelancaran distribusi barang dan jasa serta angkutan orang di Kabupaten Banyuwangi, baik lewat darat, laut maupun udara, agar tidak mengalami gangguan sehingga mempengaruhi inflasi di Banyuwangi. 2) Memperlancar arus distribusi barang dan jasa dengan melakukan Peningkatan Pembangunan Penerangan Jalan Umum serta Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum berupa pembangunan 7.387 titik lampu dan perawatan rutin sejumlah 25.000 titik. 3) Melaksanakan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan melalui pemasangan Early Warning System di 24 Perlintasan Sebidang untuk menunjang keselamatan serta memperlancar proses

distribusi barang maupun angkutan orang. 4) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas dilaksanakan dengan kegiatan Penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan berupa rambu-rambu lalu lintas sebanyak 1.900 titik. e. Dinas PU Pengairan serta Dinas PU Cipta Karya dan Penataan Ruang: Program pembangunan dan perbaikan irigasi, serta perbaikan dan pembangunan jalan juga jembatan menuju tempat produksi pertanian agar dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan yang diprogramkan sehingga akan turut mendukung produktivitas pertanian.